

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2011).

Aziz, Machfud, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).

Basuki, Sulisty, Metode Penelitian, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006).

Bawengan, Gerson, Penyidikan Perkara Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).

Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Chalia, 1984).

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I), (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Hiariej, Eddy Os., Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012).

Ibrahim, Johnnya, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2013).

- Makara, Mohammad Taufik dan Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1974).
- Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, (Jakarta: Chalia, 1983).
- Purbacaraka, Pumadi, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan, (Jakarta: Bina Cipta, 2004).
- Rasyid, Roihan A., Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, 1991).
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Subekti, R., Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Wibowo, Kurniawan Tri, Hukum Acara Pidana: Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020).

Jurnal dan Karya Ilmiah

Fadel, Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia. Makassar: Universitas Hasanudin.

Helmi, Muhammad Ishar, Penerapan Azas *Equality Before the Law* Dalam Sistem Peradilan Militer, Jurnal Cita Hukum, Volume I, Nomor 2 Desember 2013.

Maharani, Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban) Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2019.

Mulyoto, Arintya Yogantari, Legalitas Saksi Verbalitas Dalam Pemeriksaan di Persidangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Thesis, Universitas Brawijaya, 2018.

Rahman, Fathur, Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Dalam Sidang Peradilan Pidana, Jurnal Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Volume 2, Nomor 1, 2017.

Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Hukum Prioris, Volume 5 Nomor 2, 2016.

Walanti, Sindura Deberi dan Bagas Pradikta Haryanto, Tinjauan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 104/Pid.B/2013/PN.LB.BS), GEMA, 2015.

Wandari, Vika Ayu, Keterangan Ahli Warga Negara Asing dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Lentera Hukum, Volume 5, Issue 1 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Peraturan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk Pengadilan Negeri
Yogyakarta.